

ANALISIS FAKTOR DETERMINAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

Agus Kurniawan

gustyawan1981@gmail.com

Agustinus Salle

Yundy Hafizrianda

Abstract

The completion of the BPK RI TLHP, which is a manifestation of the performance of the West Papua Provincial government is reflected in the reconciliation data for follow-up monitoring in 2021 until the second semester of December 2021. From the Follow-up Monitoring Report of the Audit Board Audit Results for Semester II of 2021 number: 69/PTL/XIX.MAN/12/2021 dated December 17, 2021, for the 2005 to 2021 fiscal year period, the total number of findings is 548 with 1472 recommendations, the recommendation value is IDR. 364,202,688,959.23. The suboptimal completion of the TLHP indicates that there are problems in the implementation of the BPK TLHP in West Papua Province by the West Papua Regional Inspectorate TLHP Team, this can be seen in the data from 2005 to the second semester of 2021 from the results of the reconciliation of PTL LHP, the percentage of completion of the Follow-up is only 70.04%, this is due to the lack of optimal support / involvement of all parties in the implementation of TLHP as a form of accountability. The results of research by testing variables using the SmartPLS application show that the variables of commitment, SOP, competence, and communication as a whole influence each other in the form of a path model; SOP affects commitment, SOP affects competence, Commitment affects competence, and competence affects communication. The overall path relationship is significant below 5 percent. Determinant indicators reflected in the high commitment of the leadership consist of: the ability of the leadership to motivate employees in the spirit of creating a work team, the ability of the leadership to motivate employees to complete the recommendation target, and the ability of the leadership to coordinate regarding the results of the examination. The indicators that improve the quality of the follow-up SOP are clarity of the flow that must be done on the results of the examination, the ability of employees to understand the contents of the SOP, and the application of the SOP in the examination follow-up activities.

Keywords: *Analysis of the follow-up of BPK RI findings, commitment variables, SOPs, competence and communication in West Papua Province*

INTRODUCTION

Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK merupakan suatu kewajiban yang di emban oleh pejabat, yakni satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan Negara. Kewajiban ini termaktub di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengelolaan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur di dalam Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLHP BPK pada Instansi Pemerintah.

Menurut Kaplan dan Norton (1996) untuk mencapai kinerja yang handal ada 3 (tiga) faktor yang perlu diperhatikan yaitu, kemampuan pegawai (*employee capability*) kemampuan sistem informasi (*information system capability*), motivasi pemberdayaan dan keserasian individu (*motivation, empowerment, and capability*). Faktor-faktor tersebut digunakan untuk memperkecil kesenjangan dalam bentuk peningkatan kemampuan sistem dan teknologi informasi, meluruskan prosedur, dan perbaikan rutinitas.

Penyelesaian TLHP yang merupakan perwujudan kinerja pemerintah Provinsi Papua Barat tercermin dalam data rekonsiliasi pemantauan tindak lanjut tahun 2021 sampai dengan semester II bulan Desember TA 2021. Dari Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II tahun 2021 nomor: 69/PTL/XIX.MAN/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 periode tahun anggaran 2005 s/d 2021 jumlah temuan total 548 dengan rekomendasi 1472 nilai rekomendasi Rp. 364.202.688.959,23 telah di tindak lanjuti sesuai rekomendasi 1026 temuan dengan nilai rekomendasi Rp.76.691.141.340,36 belum sesuai rekomendasi 248 temuan dengan nilai Rp.98.801.551.973,23 temuan belum di tindaklanjuti 193 temuan dengan nilai Rp.188.709.995.645,64 dan ada 5 temuan yang tidak dapat di tindaklanjuti.

Belum optimalnya penyelesaian TLHP mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan TLHP BPK di Provinsi Papua Barat oleh Tim TLHP Inspektorat Daerah Papua Barat, hal ini terlihat pada data tahun 2005 sampai dengan semester II tahun 2021 dari hasil rekonsiliasi PTL LHP persentasi penyelesaian Tindak lanjut hanya 70.04% hal ini karena masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, dari gambaran tersebut diatas dapat dikatakan belum optimalnya dukungan/keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan TLHP sebagai wujud akuntabilitas.

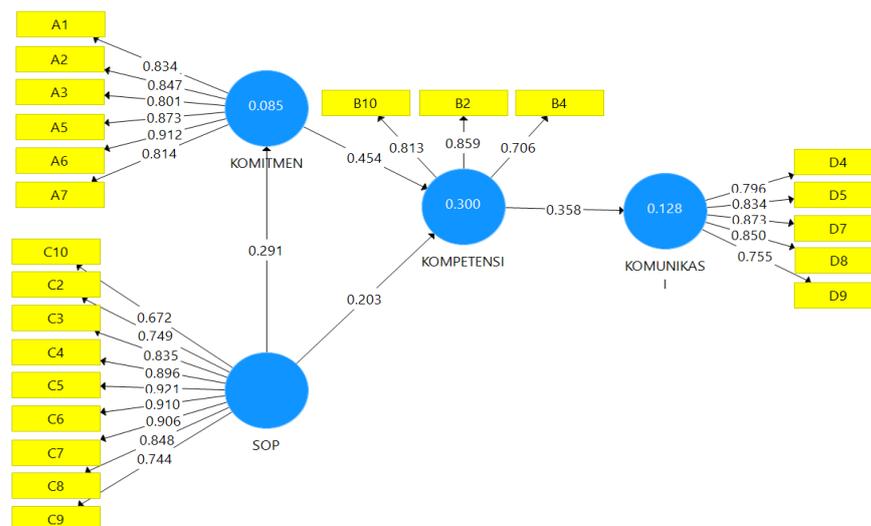
Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pengaruh antar variabel komitmen pimpinan, variabel kompetensi, variabel kinerja, variabel SOP dan variabel komunikasi terhadap kinerja tindaklanjuti (2) mengetahui variabel determinan yang mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK RI.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kuantitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Lokasi penelitian di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sumber data diperoleh langsung dari sumber informasi yaitu obyek peneliti (responden) OPD dengan teknik pengumpulan data/instrumen berupa kuesioner dengan sampel pada 48 (empat puluh delapan) OPD Lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Metode penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan software SmartPLS, yang dijalankan dengan media komputer. PLS (Partial Least Square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model Struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas. Sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas. PLS (Partial Least Square)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Construct Reliability and Validity



Gambar 1.

Hasil Uji Construct Reliability and Validity

Structural Equation Model- partial least squared atau disingkat SEM-PLS memiliki dua evaluasi model yakni measurement model dan struktural model. Evaluasi measurement model melihat tingkat realibel dan validitas dari loading factor > 0.7 , nilai Cronbach's alpha > 0.5 , Composite reliability > 0.7 dan averange variance extracted (AVE) > 0.7 .

OUTNER MODEL

Uji weights or loadings menunjukkan nilai loading faktor komitmen pimpinan berkisar antara 0,81-0,90, nilai loading kompetensi berkisar 0,81 -0,86, nilai loading komunikasi berkisar 0,75 – 0,87 dan nilai loading SOP 0,67-0,92. Seluruh indikator dinyatakan valid karena loading faktornya berkisar di atas 0,50. uji disciminan validity menunjukkan nilai korelasi cross loading seluruh indikator faktor tindaklanjut berkisar 0,70-0,92.

Goodnes of fit

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui berbagai kriteria goodness of fit. Goodness of fit dalam PLS dibagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut.

Outer Model

Uji Convergent Validity

Uji convergent validity dilakukan untuk mengetahui validitas dari indikator yang digunakan. Indikator dinyatakan valid dengan nilai weights or loadings faktor berkisar di atas 0,50. Uji weights or loadings faktor masing-masing variabel dapat dilihat pada **Tabel 1** sebagai berikut:

Table 1. Uji Convergent Validity

	KOMITMEN	KOMPETENSI	KOMUNIKASI	SOP
A1	0,83			
A2	0,85			
A3	0,80			
A5	0,87			
A6	0,90			
A7	0,81			
B10		0,81		
B2		0,86		
B4		0,71		
C10				0,67
C2				0,74

	KOMITMEN	KOMPETENSI	KOMUNIKASI	SOP
C3				0,83
C4				0,89
C5				0,92
C6				0,91
C7				0,90
C8				0,67
C9				0,74
D4			0,80	
D5			0,83	
D7			0,87	
D8			0,85	
D9			0,75	

Berdasarkan tabel 1, uji weights or loadings menunjukkan nilai loading faktor komitmen pimpinan berkisar antara 0,81-0,90, nilai loading kompetensi berkisar 0,81 -0,86, nilai loading komunikasi berkisar 0,75 – 0,87 dan nilai loading SOP 0,67-0,92. Seluruh indikator dinyatakan valid karena loading faktornya berkisar di atas 0,50.

Uji Discriminant Validity

Uji discriminant validity dilakukan untuk mengetahui korelasi antara tiap indikator dengan semua variabel laten yang ada. Seluruh indikator dinyatakan valid jika nilai korelasi cross loading seluruh indikator yang digunakan dalam membentuk variabel laten, lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten yang lain. Nilai korelasi cross loading masing-masing variabel.

Table 2. Uji Discriminant Validity

	KOMITMEN	KOMPETENSI	KOMUNIKASI	SOP
A1	0,834			
A2	0,847			
A3	0,801			
A5	0,873			
A6	0,912			
A7	0,814			
B10		0,813		
B2		0,859		
B4		0,706		
C10				
C2				0,749
C3				0,835
C4				0,896
C5				0,921

	KOMITMEN	KOMPETENSI	KOMUNIKASI	SOP
C6				0,910
C7				0,906
C8				0,848
C9				0,744
D4			0,796	
D5			0,834	
D7			0,873	
D8			0,850	
D9			0,755	

Berdasarkan table 2, uji disciminan validity menunjukkan nilai korelasi cross loading seluruh indikator faktor tindaklanjut berkisar 0,70-0,92.

Average Variance Extracted (AVE)

Uji Average Variance Extracted (AVE) dilakukan untuk mengetahui nilai yang menunjukkan besarnya varian indikator yang dikandung oleh variabel. Nilai AVE seluruh variabel dinyatakan valid apabila nilai AVE berkisar di atas 0,5. Nilai AVE masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3. Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Komitmen	0.719	Valid
Kompetensi	0.632	Valid
Komunikasi	0.677	Valid
SOP	0.698	Valid

Uji Composite Reliability dilakukan untuk mengetahui nilai yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya untuk digunakan. Seluruh variabel dinyatakan reliable apabila nilai loading-nya di atas 0.70. Nilai composite reliability masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Komitmen	0.939	Reliability
Kompetensi	0.837	Reliability
Komunikasi	0.913	Reliability
SOP	0.954	Reliability

Dari table di atas memberikan informasi bahwa model yang terbentuk sudah memenuhi syarat reliabel karena semua variabel latent yang telah memenuhi persyaratan baik nilai cronbach' alpha, compisite reliability, dan variance extracted. Sementara outer loading dapat dilihat dari masing-masing variable latent, nilai yang memenuhi syarat dari outer loading adalah > 0.7 .

Evaluasi struktural model melihat besar kecilnya effect disetiap jalur dengan melihat t statistik berikut pengukuran model endogen dengan nilai R2.

Tabel 5 evaluasi struktural model peran komitmen tindak lanjut pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan komunikasi.

Tabel 5. Evaluasi Struktural Model

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Komitmen >> Kompetensi	0.454	0.48	0.114	3.984	0.000
Kompetensi >> Komunikasi	0.358	0.389	0.094	3.695	0.000
SOP >> Komitmen	0.291	0.301	0.113	2.782	0.010
SOP >> Kompetensi	0.203	0.209	0.1	2.173	0.043

Berdasarkan tabel 5 terdapat semua jalur memiliki nilai hubungan yang signifikan yakni hubungan atau pengaruh komitmen terhadap kompetensi (p-value = 0.000), hubungan atau pengaruh kompetensi terhadap komunikasi (p-value=0.000), hubungan atau pengaruh SOP terhadap komitmen (p-value=0.010), pengaruh SOP terhadap kompetensi (p-value=0.043). Kesemua jalur memiliki p-value dibawah 5 persen.

Arah hubungan setiap jalur adalah positif karena semua tanda koefisien bernilai positif. Variabel komitmen dan SOP memiliki hubungan yang searah dengan komunikasi. Artinya, jika terjadi peningkatan komitmen dan penerapan SOP maka diprediksi terjadi kenaikan komunikasi. Kompetensi juga memiliki pengaruh searah terhadap komunikasi dan berperan sebagai variabel moderator antara SOP, komitmen dan komunikasi. Artinya, SOP dan komitmen dalam pengaruhnya meningkatkan komunikasi sebelumnya akan mempengaruhi kompetensi terlebih dahulu.

Evaluasi Inner Model

Evaluasi inner model dilakukan dengan uji bootstrapping yang menghasilkan nilai koefisien determinasi R square, Q square, path coefficients, latent variable correlations. Hasil evaluasi inner model dijelaskan sebagai berikut.

Koefisien Determinasi RSquare

R Square berfungsi untuk melihat nilai signifikansi dari variabel laten.

Tabel 6. R Square

	R Square	R Square Adjusted
KOMITMEN	0,085	0,073
KOMPETENSI	0,300	0,283
KOMUNIKASI	0,128	0,117

Nilai R squared pada tabel 6 memiliki nilai antara 0 hingga 1. Nilai yang mendekati 1 akan semakin akurat melakukan prediksi. Namun, menurut Hair (2021) tingginya nilai R² akan bergantung kepada model yang kompleks dan disiplin ilmu, sehingga tidak menjadi tolak ukur yang pasti terutama terhadap ilmu sosial. R² pada model kompetensi yang bernilai 0.3 dapat dikatakan tinggi terlebih kompetensi, komitmen dan komunikasi merupakan nilai sosial. Hubungan keseluruhan variabel latent selanjutnya dihitung menghasilkan total effect. Total effect terdiri dari dua komponen utama, yakni pengaruh langsung, pengaruh sebuah variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung, dan pengaruh tidak langsung, pengaruh variabel independen melalui variabel moderator.

Q Square

Suatu model dianggap mempunyai nilai predictive yang relevan jika nilai Q square lebih besar dari 0 (>0). Nilai predictive-relevance diperoleh dengan rumus berikut:

$$Q^2 = 1 - (1-R_1^2) (1-R_2^2) (1-R_3^2) (1-R_4^2)$$

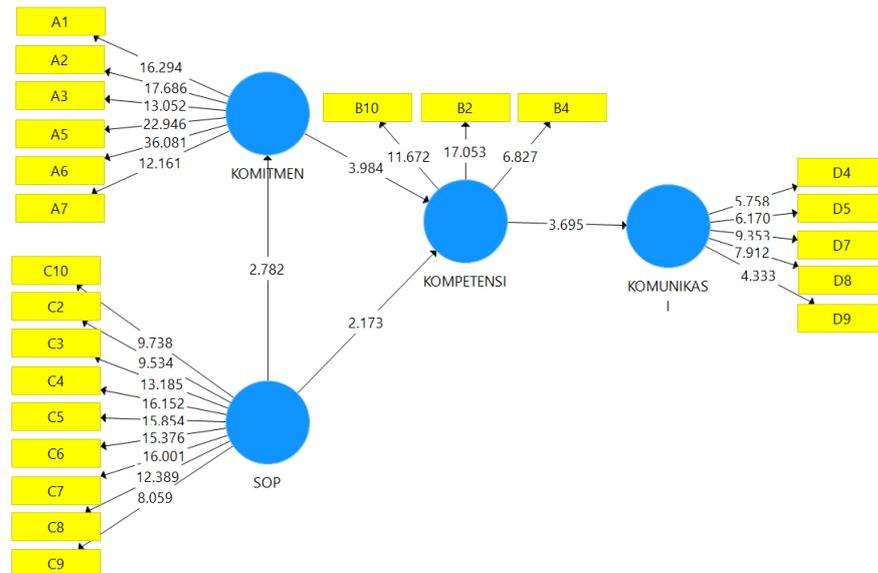
$$Q^2 = 1 - (1-0,08^2) (1-0,30^2) (1-0,12^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1-0,006) (1-0,09) (1-0,014)$$

$$Q^2 = 1 - (0,99) (0,91) (0,98)$$

$$Q^2 = 0,11$$

Hasil perhitungan Q Square pada penelitian ini adalah 0,11. Hal ini berarti model dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan variabel edrokan kinerja.



Gambar 2.

Hasil Uji final relationship model peran komitmen tindak lanjut pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan komunikasi

Gambar tersebut menerangkan hubungan disetiap variabel latent. Komunikasi dipengaruhi oleh kompetensi dengan nilai t statistik 3.695. Komunikasi secara langsung hanya dipengaruhi oleh variabel kompetensi Komunikasi juga dipengaruhi oleh komitmen dan SOP secara tidak langsung melalui variable kompetensi. Variabel komitmen memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap kompetensi dibandingkan variabel SOP memengaruhi kompetensi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t statistik antara komitmen dan kompetensi (3.984) lebih tinggi dibandingkan nilai t statistik antara variabel SOP dan kompetensi (t statistik=2.173).

Indikator yang memiliki pengaruh tinggi dalam meningkatkan komitmen adalah A6, A5, dan A2. Masing-masing memiliki outer loading 36.081; 22.946; 17.686. A6 merupakan indikator kemampuan pemimpin meningkatkan motivasi pegawai untuk semangat menciptakan tim kerja dalam menyelesaikan rekomendasi BPK RI. A5 merupakan indikator kemampuan pemimpin dalam memotivasi para bawahannya untuk menyelesaikan target rekomendasi BPK RI. Sedangkan A2 merupakan indikator pemimpin dapat melakukan koordinasi dengan baik terhadap hasil pemeriksaan.

Indikator yang memiliki pengaruh tinggi dalam meningkatkan SOP adalah C4, C7, dan C5. Masing-masing nilai outer loadingnya adalah 16.152; 16.00; dan 15.85. indikator C4 merupakan sebuah indikator yang memberikan kejelasan terhadap alur yang harus dilakukan terhadap hasil pemeriksaan. C7 merupakan indikator kemampuan pegawai dalam memahami isi dari SOP. C5 merupakan indikator penerapan SOP dalam kegiatan atau setiap pelaksanaan operasional.

Variabel eksogen dinyatakan signifikan pada variabel endogennya apabila hasil t-statistic lebih besar dari t-tabel 2,0423 (tingkat signifikansi 2,5 %, DF=30). Hasil t-statistic masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7. total effect faktor terhadap variabel endogen peran komitmen tindak lanjut pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja, dan komunikasi

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	St Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Komitmen >> kompetensi	0.454	0.471	0.114	3.984	0.000
Komitmen >> komunikasi	0.162	0.185	0.066	2.459	0.014
Kompetensi >> komunikasi	0.358	0.389	0.097	3.695	0.000
SOP >> komitmen	0.291	0.299	0.105	2.782	0.006
SOP >> kompetensi	0.335	0.353	0.074	4.531	0.000
SOP >> komunikasi	0.12	0.138	0.045	2.665	0.008

Path Coefficients

Tabel 7. Path Coefficients

	KOMITMEN	KOMPETENSI	KOMUNIKASI	SOP
KOMITMEN		0,454		
KOMPETENSI			0,358	
KOMUNIKASI				
SOP	0,291	0,203		

Kalkulasi total dilakukan setiap jalur yang available dan menghasilkan tabel 4.12 variabel komitmen memiliki pengaruh terhadap 2 variabel lainnya, yakni kompetensi dan komunikasi.

Pengaruh komitmen terhadap kompetensi merupakan pengaruh yang paling besar diantara hubungan variabel lainnya karena memiliki nilai original sample tertinggi (0.454 dan searah). Hal ini membuktikan bagaimana komitmen pimpinan dapat memengaruhi kinerja instansi. Komitmen pimpinan juga memengaruhi komunikasi dalam organisasi. Hal ini ditunjukkan oleh hubungan komitmen dengan komunikasi yang signifikan.

Kesemua hubungan variabel dalam total effect memiliki nilai p-value dibawah 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa variable laten dalam model keseluruhannya secara signifikan memiliki pengaruh yang nyata. Komitmen dan SOP memengaruhi kompetensi yang selanjutnya akan memengaruhi komunikasi dalam organisasi. Komitmen dipengaruhi SOP menunjukkan bahwa SOP merupakan dasar proses bisnis yang dilakukan baik oleh pimpinan maupun anggota organisasi. Pada proses operasional pelaksanaan SOP akan menimbulkan komitmen pimpinan pada saat mereka memahami SOP secara menyeluruh.

Hasil ini mendukung hipotesis H1: Komitmen, kompetensi, kinerja, SOP, komunikasi berpengaruh terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja serta memiliki hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel.

Penelitian ini menguji pengaruh Faktor Determinan Komitmen Pimpinan, Kompetensi, Standar Operasional dan Prosedur (SOP), dan Komunikasi dalam pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK RI terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Pada komitmen pimpinan, hasil dari penelitian ini mendukung teori yang disebutkan Locke dan Latham (2022) dalam teori penetapan tujuan (goal setting theory) bahwa tiga moderator yang menunjukkan keberhasilan tujuan yaitu: (1) pentingnya hasil yang di harapkan dari pencapaian tujuan (2) keyakinan seseorang bahwa mereka mampu mencapai tujuan (3) Komitmen kepada orang lain. Dalam penelitian lain oleh Lusiana, Ali Djamhuri & Yeny Widya Prihatiningtias (2017) komitmen memberikan kekuatan (power) untuk melakukan hal yang terbaik bagi organisasi melalui semua skil kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan OPD akan menimbulkan semangat bagi seluruh pegawai untuk mengikuti arahan dari pimpinannya.

Kompetensi pegawai atau pengetahuan, ketrampilan maupun personil memiliki pengaruh dalam upaya menindak lanjuti temuan BPK RI, hal yang sama juga di sampikan dalam penelitain oleh Lina Anatan dan Lena Elitan (2007) menyatakan strategi bisnis akan berhasil jika organisasi mampu mengelola dan menjalankan kualitas SDM (SDM berbasis kompetensi) peningkatan kompetensi ini dapat melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan.

Permasalahan SOP (Standar Oprasional Prosedur) dari hasil pengujian memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK RI. Hal ini di karenakan dalam proses tindak lanjut sepenuhnya dilakukan berdasarkan prosedur yang tertuang dalam SOP TLHP BPK RI, sehingga apabila tahapan-tahapan dalam administrasi ini tidak di pahami maka akan menghambat proses penyelesaian TLHP. Pada penelitian yang lain di ungkapkan oleh Josmar lambok Banjar Nahor, Ade Adriani, Wahyudian Nor (2021) dalam Analisis penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada pemeriksaan kinerja atas kegiatan APIP Inspektorat Kabupaten Barito Timur bahwa perlunya Juklak/Juknis SOP yang memadai dan pedoman untuk dapat menindaklanjuti hasil temuan.

Masalah Komunikasi juga memiliki pengaruh yang positif terhadap tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat. Komunikasi dapat di lakukan baik secara lisan maupun tertulis, baik dari pimpinan, tim pemeriksa maupun tim tindak lanjut dari Inspektorat Daerah Papua Barat. Dengan adanya komunikasi yang jelas maka informasi dapat tersampaikan dan dipahami oleh OPD dalam menindaklanjuti temuan BPK RI. Penelitain yang di lakukan oleh (Harinurhady, Rifai'i & Alamsyah 2017) tentang analisis penyelesaian TLHP Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat. Kendala utama penyebab masih adanya temuan yang tidak atau belum selesai di tindaklanjti atau belum selesai di antaranya adalah kurangnya komunikasi yang baik di tingkat manajemen SKPD.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, permasalahan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Variabel komitmen, SOP, kompetensi dan komunikasi secara keseluruhan saling mempengaruhi dalam bentuk model jalur; SOP memengaruhi komitmen, SOP memengaruhi kompetensi, Komitmen memengaruhi kompetensi, dan kompetensi memengaruhi komunikasi. Keseluruhan hubungan jalur tersebut signifikan dibawah 5 persen. (2) Variabel SOP dan variabel komitmen berperan sebagai variabel input karena secara bersama-sama memengaruhi kompetensi dan komunikasi. Sedangkan variabel kompeten berperan sebagai moderator variabel karena berpengaruh langsung terhadap peningkatan komunikasi dan menjadi penengah antara hubungan variabel komitmen dengan komunikasi, dan variabel SOP dengan komunikasi. (3) Pengaruh total menunjukkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh besar terhadap nilai kompetensi anggota instansi. Hubungan ini memiliki nilai hubungan tertinggi (0.45) dibanding dengan model jalur yang lain. Sedangkan SOP memiliki pengaruh terhadap komitmen pimpinan (0.291) yang menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dilakukan sesuai petunjuk SOP dalam instansi. (4) Indikator yang determinan tercermin dari tingginya komitmen pimpinan terdiri dari: kemampuan pimpinan memotivasi pegawai dalam semangat menciptakan tim kerja, kemampuan pimpinan dalam memotivasi pegawai menyelesaikan target rekomendasi, dan kemampuan pimpinan dalam melakukan koordinasi terkait hasil pemeriksaan. (5) Adapun indikator yang meningkatkan kualitas SOP tindak lanjut adalah: kejelasan alur yang harus dilakukan terhadap hasil pemeriksaan, kemampuan pegawai dalam memahami isi SOP, dan penerapan SOP dalam kegiatan tindak lanjut pemeriksaan.

REFERENCES

- Adams, J., (1965), Inequity in Social Exchange, In *Advances in Experimental Social Psychology* 2, edited by L. Berkowitz, New York, Academic Press
- Arens and Loebbecke, 2014 (*Auditing : An Integrated Approach, eight edition,*)
- Atambua, Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, <http://www.slideshare.net/atambua/uu-no151>, diakses pada tanggal 24 Mei pukul 14.59 WIB
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat, Mitra Jaya, Manokwari, 2019.
- Boynton (2001.980). "Internal Auditing is an, Independent, Assurance and Consulting Activity Designed to Add Value and Improve an Organization's Operations".
- Diponegoro Journal Of Accounting Pipit Siti Jenar Puspitasari, Dwi Ratmono Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa da Bali.
- Hair JFH, Hult GTM, Ringle CM, Sarstedt M, Danks NP, Ray S. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. vol. 1. 1st ed. Springer; 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hartono Tri. 2006. <http://eprints.undip.ac.id>. Tesis Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang (Studi Kasus Pada Bank BTPN). Universitas Diponegoro. Semarang.
- HiroTugiman. "Standar Profesional Internal Audit" (2005,11)
- Ir. Syofian Siregar, MM Metode penelitian kuantitatif, kencana Prenada Media Group 2012. Jurnal Akutansi dan Keuangan Josmar Lambok Banjar Nahor, Ade Adriani, Wahyudin Nor Volume 9 Nomor 1 tahun 2021 Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan APIP Inspektorat Kabupaten Barito Timur.
- Kaplan S. Robert and David P. Norton. 1996. *The Balanced Scorecard Translating Strategy into Action*. Edisi Satu. United States of America. Harvard Business School Press
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2019). The development of goal setting theory: A retrospective. *Science*, half 5(2), century *Motivation* 93–105.
- Lusiana, Ali Djahhuri & Yenedy Widya Prihatiningtias (2017) Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- Modul manajemen fungsi audit internal sektor publik (2007)
- Mulyadi. 2014. *Auditing Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat
- Murwanto, Rahmadi, Adi Budiarmo, dan Fajar Hasri Ramadhana. 2009. *Audit Sektor Publik (Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prof.Dr. Sugiyono. *Metode penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* Alfabeta 2012.
- Rahman IA, Memon AH, Karim ATA. Examining factors affecting budget overrun of construction projects undertaken through management procurement method using PLS-SEM approach. *Procedia - Soc Behav Sci* 2013;107:120–8. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.407>.
- Rudji, V. V. (2018). Faktor Penyebab Lambatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI (Studi Pada Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat).

- Sekaran, Uma. 1992. "Research Methods for Business". Third Edition. Southern Illionis University.
- Sejarah Provinsi Papua Barat <https://papuabarat.bpk.go.id/wilayah-pemeriksaan/provinsi-papua-barat>
- Sisilia Amelia Essing, David P.E Saerang, Linda Lambey (2017) Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Deponegoro.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Yusuf, Haryono, 2013, Auditing (Pengauditan), Yogyakarta: STIE Yogyakarta.